



Rencana Kerja

(Renja)

Tahun 2025

Kecamatan Kebasen

Jalan Raya PUK NO. 50 KEBASEN Kode Pos 53172
Telp. (0281) 6847660 email: kebasen@banyumaskab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyusun Rancangan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2024 yang merupakan bentuk pelaksanaan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebasen Tahun 2025 ini disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dan program kegiatan Kecamatan Kebasen sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebasen.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna sehingga masih memerlukan perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami perlukan. Namun demikian kami berharap Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Tahun 2025 dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini kami ucapkan terima kasih.

Kebasen, 25 Maret 2024

CAMAT KEBASEN



WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP., M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19780220 199612 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten dan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas tahun 2011-2031;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
 15. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.;
 16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyumas 2022;
 17. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023;
 18. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026;

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2025 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025.

Tujuan:

1. Sebagai pedoman Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.
2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama tahun 2025.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**, berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang startegis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**, menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan**, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Menguraikan Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama tahun 2023 yang sedang berjalan dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Kecamatan Kebasen Tahun 2023 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Jumlah anggaran belanja pada APBD Perubahan

Tahun 2023 sebesar Rp 2.471.611.567,00 terdiri dari belanja operasi Rp 2.419.253.567,00 dan belanja modal Rp 52.358.000,00. Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 2.313.635.581 (95,63%) untuk belanja operasi dan sebesar Rp 51.000.000 (97,41%) untuk belanja modal. Program Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Kebasen merupakan program dengan serapan anggaran terbesar yaitu 99,86%, sedangkan program Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik menunjukkan serapan terkecil yaitu 81,45%. Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2023 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 5 program, 11 kegiatan, dan 25 sub kegiatan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam tabel T-C.29 sebagai berikut :

Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023								
														1		2									3		4				
						5		6		7															8		9		10		11
K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp				
						K	Rp	K	Rp																			K	Rp	K	Rp
Persentase pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan Kecamatan Kebasen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Kebasen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai Kecamatan Kebasen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	
							4.591.000		4.591.000		4.591.000																				
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dok	3		3		3		3		3		3		1		0		1		1		3		100		6		200			
							4.591.000		4.591.000		4.591.000																				
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	12		12		12		12		12		12		3		3		3		3		12		100		24		200			
							1.374.435.072		1.374.435.072		1.451.567.684																				
Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		3		100		3		100			
							1.341.555.072		1.341.555.072		1.420.807.684																				
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	13		11		13		13		13		13		11		11		9		10		10		76.92		10		76.92			

Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023						Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
												1		2		3		4									
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
4	4A	5		6		7						8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
							32.880.000		32.880.000		30.760.000																
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12		4		12		12		12		3		6		9		12		12		100		12		100	
							102.892.900		102.892.900		293.389.784																
Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		100		6		100	
							3.672.000		3.672.000		6.244.000																
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		100		6		100	
							19.449.500		19.449.500		33.069.084																
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100	
							2.781.000		2.781.000		3.513.000																
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3		3		3		3		3		0		3		3		3		3		100		3		100	
							52.465.000		52.465.000		61.285.000																
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		100		4		100	

Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023									
														1		2		3		4									12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
														K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK									DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp
4	4A																																			
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		100		6		100										
							7.500.000		7.500.000		12.690.000																									
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15		15		15		15		15		15		15		15		15		15		100		15		100										
																						0														
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3		3		3		3		3		0		3		3		3		3		100		3		100										
							9.730.300		9.730.300		9.730.300																									
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Kebasen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100										
							9.730.300		9.730.300		9.730.300																									
Jumlah Jenis Pelayanan Di Kecamatan	Jenis	2		2		2		2		2		2		2		2		2		2		100		2		100										
							6.900.300		6.900.300		6.900.300																									
Jumlah Laporan Pelaksanaan	Laporan	12		12		12		12		12		3		3		3		3		12		100		24		200										

Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	
														1		2		3		4								
						K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp							
4	4A																											
Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan							2.830.000		2.830.000		2.830.000																	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	12		12		12		12		12		3		6		9		12		12		100		12		100		
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kebasen	%	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		
Jumlah Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	Desa	12		12		12		12		12		12		12		12		12		12		100		12		100		
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	5		5		5		5		5		5		5		5		5		5		100		5		100		

Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023		Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)		Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023		
														1		2		3		4									12=8+9+10+11
						K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp								K
4	4A	5		6		7								8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	4		5		4		4		4				1		2		2		3		8		200		13		325	
							1.960.000		1.960.000		1.910.000																		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	4		2		4		4		4				0		0		1		2		3		75		5		125	
							2.530.000		2.530.000		2.530.000																		
Jumlah kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan	2		2		2		2		2				0		0		1		1		2		100		4		200	
							2.530.000		2.530.000		2.530.000																		
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang	Laporan	4		3		4		4		4				0		1		2		2		2		50		2		50	

Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2023	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2022		Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2023								Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2023 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2023								
													1		2		3		4						12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5	
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	DPA INDUK						DPA PERUBAHAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	3		0		3		3		3		0		0		2		1		3		100		3		100						

Sumber : e money form 1 2023



CAMAT KEBASEN

WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP., M.A.P
 Pembina Tk. I
 NIP. 197802201996121001

II.2

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Adapun susunan organisasi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan Desa;
4. Seksi Ekonomi Pembangunan;
5. Seksi Pelayanan ;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2023

Sedangkan untuk anggaran belanja perubahan tahun 2023 sebesar Rp 2.471.611.567,00, terurai dalam 5 program, 11 kegiatan dan 25 sub kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2025 diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas**

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2022	Target 2023
PROGRAM 1.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1.1.1	Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100
1.1.2	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	%	100	100	100
PROGRAM 1.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1.2.1	Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100
PROGRAM 1.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1.3.1	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100
PROGRAM 1.4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
1.4.1	Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100
PROGRAM 1.5	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1.5.1	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100
1.5.2	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100
1.5.3	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	100	100
1.5.4	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100

II.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023 dapat dikemukakan beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kebasen sebagai berikut:

- a. Masih belum optimalnya kinerja pelayanan Kecamatan yang prima;

- b. Masih belum optimalnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Treatment*). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kebasen. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. *Strenght* (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan Pelayanan Kecamatan.
2. SDM Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 24 orang yang didominasi oleh pendidikan S1. Dilihat dari pendidikan regular, pegawai Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020. Tupoksi yang jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan dan pengendalian, serta penelitian dan pengembangan

B. *Weakness* (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan Pelayanan Kecamatan antara lain:
 - Keterlibatan *stakeholder* dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
 - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
 - Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
 - Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

C. *Opportunity* (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung Pelayanan Kecamatan. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
2. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang Pelayanan Kecamatan;
3. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
4. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
5. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
6. Banyaknya Lembaga-Lembaga Litbang yang bisa menjadi mitra kerja;

D. *Treatment* (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;
4. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
5. Perubahan peraturan perundangan;
6. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas dalam Pelayanan Kecamatan maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas tahun 2024 - 2026, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas adalah dengan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan sesuai SOP.

II.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD tahun 2025 menunjukkan Kecamatan Kebasen memiliki 6 program dan 14 kegiatan.

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
						Awal	2024		2025	
						Target	Target	Rp	Target	Rp
				Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
								30		30,000,000
			7010620106	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	1		3	
								2,250,000		2,250,000
			7010620108	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	0	3		3	
		Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik	70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				9,640,000		9,640,000
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85.75	86		86.05.00	
								1,800,000		1,800,000
			70102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	%		100		100	
								1,800,000		1,800,000
			7010220101	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	0	4		4	
								900		900
			70102203	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	%	0	100		100	

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
							Awal	2024		2025	
							Target	Target	Rp	Target	Rp
								900		900	
			7010220301	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	0	2		2	
								6,940,000		6,940,000	
			70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	%	0	100		100	
								4,240,000		4,240,000	
			7010220402	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	0	12		12	
								2,700,000		2,700,000	
			7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	0	12		12	
		Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan						21,350,000		21,350,000	
			70104	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas	%	100	100		100	
								21,350,000		21,350,000	
			70104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan	%	0	100		100	
								1,350,000		1,350,000	
			7010420102	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	0	3		3	

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
							Awal	2024		2025	
							Target	Target	Rp	Target	Rp
								20,000,000		20,000,000	
			7010420101	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	3		3	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	25,404,000	100	25,404,000
			70103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	%		100	900	100	900
			7010320304	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	0	2	900	2	900
			70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase kegiatan pemberdayaan desa	%	0	100	24,504,000	100	24,504,000
			7010320101	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	lembaga kemasyarakatan	0	5	6,504,000	5	6,504,000
			7010320102						900		900

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
							Awal	2024		2025	
							Target	Target	Rp	Target	Rp
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	0	2		2	
									17,100,000		17,100,000
			7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	0	12		12	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan	%	100	100	26,900,000	100	26,900,000
									26,900,000		26,900,000
			70105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan	%	0	100		100	
									1,900,000		1,900,000
			7010520102	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Bimtek Sosialisasi Konsultasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang	0	60		60	
									25,000,000		25,000,000
			7010520108	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	0	6		6	
									2,145,635,000		2,167,453,000

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
						Awal	2024		2025	
						Target	Target	Rp	Target	Rp
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan			Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	77.40.00	82.35.00		82.45.00	
		Optimalnya kinerja pelayanan penunjang pemerintahan kecamatan	70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,145,635,000		2,167,453,000
			70101	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	%	100	100		100	
			70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				18,670,000		18,670,000
			70101209	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	0	100		100	
			7010120901	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				9,400,000		9,400,000
			7010120901	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	8		8	
			7010120905	Pemeliharaan Mebel				500		500
			7010120905	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	0	1		1	
			7010120906	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7,470,000		7,470,000
			7010120906	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi	Unit	0	11		11	
			7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1,300,000		1,300,000
			7010120910	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	0	1		1	
			70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah				99,207,400		104,305,100
			70101206	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum	%	0	100		100	

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
							Awal	2024		2025	
							Target	Target	Rp	Target	Rp
								23,539,000		23,539,000	
			7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	5		5	
								300		305,5	
			7010120603	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	0	1		1	
								55,980,000		55,980,000	
			7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	0	4		4	
								13,058,000		13,058,000	
			7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0	2		2	
								4,440,400		9,532,600	
			7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	0	1		3	
								1,890,000		1,890,000	
			7010120610	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	2		2	
								432,433,400		448,117,640	
			70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan	%	0	100		100	
								75,038,000		75,038,000	
			7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	0	12		12	
			7010120804					352,895,400		368,579,640	

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
							Awal	2024		2025	
							Target	Target	Rp	Target	Rp
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	0	12		12	
									4,500,000		4,500,000
			7010120803	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	2		2	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					6,650,000		7,650,000
			70101207		Persentase Pengadaan Barang	%	0	100		100	
									5,000,000		6,000,000
			7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1		1	
									1,650,000		1,650,000
			7010120705	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	3		3	
									1,584,938,200		1,584,944,260
			70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	0	100		100	
									1,552,058,200		1,552,064,260
			7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	0	12		12	
									32,880,000		32,880,000
			7010120202	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	0	12		12	
			70101201						3,736,000		3,766,000

Tujuan	Sasaran	Sasaran Program, Sasaran Kegiatan & Sasaran Subkegiatan	Program, Kegiatan & Subkegiatan		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome), Kegiatan, Subkegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Pendanaan				
							Awal	2024		2025	
								Target	Target	Rp	Target
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	0	9		9	
									1,875,000		1,875,000
			7010120101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	0	5		5	
									1,861,000		1,891,000
			7010120107	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	4		4	

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah-Laporan-RKPD Pemutakhiran

CAMAT KEBASEN



WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP., M.A.P
Pembina Tk. I
NIP. 197802201996121001

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas tahun 2025 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025 adalah "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2025 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2025 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 ditujukan pada **"Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik"**.

Arah Kebijakan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 ditujukan pada "Peningkatan perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia ." dengan prioritas daerah diarahkan pada :

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
4. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia
5. Pengembangan *smart goverment* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2024

Sesuai RPD Tahun 2024-2026, prioritas Pembangunan Daerah menjadi agenda Pembangunan pemerintahan daerah tahunan yang menjadi capaian antara menuju sasaran 3 (Tiga) Tahunan RPD. Prioritas Pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai bagian dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas Pembangunan di tingkat provinsi maupun tingkat Nasional.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran pada Renstra Kecamatan Kebasen Tahun 2024-2026 mendasarkan pada analisis terhadap isu strategis serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas selama periode Renstra tahun 2024-2026 adalah : “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas”.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan kecamatan;
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan kecamatan.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas beserta indikator kinerjanya disajikan pada tabel 3.1 sebagaimana berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formulasi	Satuan	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
					2023 Tw 2	2024	2025	2026	s/d 2026
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang berkualitas	Persentase capaian kinerja Penyelenggaraan Kecamatan = 50%*Capaian Sasaran Pelayanan Kecamatan + 50%*Capaian Akuntabilitas Pemerintahan Kecamatan	%	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	(20%*realisasi program pengawasan desa)+(20%*realisasi program pemerintahan dan pelayanan publik)+(20%*realisasi program pemberdayaan masyarakat)+(20%*realisasi program trantibum)+(20%*realisasi program pemerintahan umum)	%	100	100	100	100	100
	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Nilai	77,40	82,35	82,45	82,55	82,55

Sumber: e RPD Tahun 2024-2026

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Faktor – faktor yang menjadikan bahan pertimbangan SKPD kami dalam merumuskan program dan kegiatan, adalah disamping untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi SKPD juga ada pertimbangan lain seperti :

- a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
 1. Pencapaian SDGs
 2. Pengentasan kemiskinan
 3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- b. Dengan adanya pertimbangan – pertimbangan melalui desk rancangan awal RKPD 2024, kami telah menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Pagu : Rp. **2.167.453.000,00**

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 3.766.000,00
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 1.584.944.260,00
- c) Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 104.305.100,00
- d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 7.650.000,00
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 448.117.640,00
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pagu Anggaran : Rp. 18.670.000,00

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Pagu : **Rp. 9.640.000,00**

- a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Pagu Anggaran : Rp. 1.800.000,00
- b) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
Pagu Anggaran : Rp. 900.000,00
- c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pagu Anggaran : Rp. 6.940.000,00

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Pagu : **Rp. 25.404.000,00**

a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Pagu Anggaran : Rp. 24.504.000,00

b) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Pagu Anggaran : Rp. 900.000,00

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pagu : **Rp. 21.350.000,00**

a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pagu Anggaran : Rp. 21.350.000,00

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pagu : **Rp. 26.900.000,00**

a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pagu Anggaran : Rp. 26.900.000,00

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Pagu : **Rp. 41.700.000,00**

a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu Anggaran : Rp. 41.700.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - 2) Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
 - 3) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - 2) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 3) Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN KEBASEN KAB. BANYUMAS
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
		KECAMATAN KEBASEN			2.292.447.000				2.401.204.000	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN			2.292.447.000				2.401.204.000	
	7.01	KECAMATAN			2.292.447.000				2.401.204.000	
1	37073	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah</i>	1	2.167.453.000			-	2.303.610.000	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	9 Dokumen	3.766.000			-	8.450.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	1.875.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.589.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	4 Laporan	1.891.000	Kab. Banyumas, Kebasen,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.861.000	KECAMATAN KEBASEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa				
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>	1	1.584.944.260			-	1.600.464.900	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	12 Orang/bulan	1.552.064.260	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.567.584.900	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	32.880.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		32.880.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum</i>	1	104.305.100			-	134.020.100	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	5 Paket	23.539.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		23.956.500	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	1 Paket	305.500	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.640.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	55.980.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		55.980.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket	13.058.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		14.408.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3 Laporan	9.532.600	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		36.145.600	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	2 Dokumen	1.890.000	Kab. Banyumas, Kebasen,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.890.000	KECAMATAN KEBASEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa				
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang</i>	1	7.650.000			-	52.000.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	3 Unit	1.650.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.000.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	6.000.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan</i>	1	448.117.640			-	489.055.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	75.038.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		81.107.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	2 Laporan	4.500.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		15.842.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	368.579.640	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		392.106.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	1	18.670.000			-	19.620.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	8 Unit	9.400.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.850.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel								
			<i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>	1 Unit	500.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.000.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	11 Unit	7.470.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7.470.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	1.300.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.300.000	KECAMATAN KEBASEN
2	37438	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	86 Indeks	9.640.000			-	12.210.000	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Kecamatan</i>	1	1.800.000			-	1.800.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>	4 Laporan	1.800.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.800.000	KECAMATAN KEBASEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	<i>Persentase koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum</i>	1	900.000			-	900.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</i>	2 Dokumen	900.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</i>	1	6.940.000			-	9.510.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan								
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan</i>	12 Laporan	4.240.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.360.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan								
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan</i>	12 Laporan	2.700.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.150.000	KECAMATAN KEBASEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
3	37803	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>	1	25.404.000			-	25.404.000	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Persentase kegiatan pemberdayaan desa</i>	1	24.504.000			-	24.504.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>	5 Lembaga K emasyarakat an	6.504.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		6.504.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan								
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>	2 Dokumen	900.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>	12 Laporan	17.100.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		17.100.000	KECAMATAN KEBASEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase fasilitasi kecamatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat</i>	1	900.000			-	900.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat								
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>	2 Laporan	900.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		900.000	KECAMATAN KEBASEN
4	38169	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas</i>	1	21.350.000			-	21.350.000	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<i>Persentase koordinasi pencegahan gangguan yang dilakukan</i>	1	21.350.000			-	21.350.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>	3 Laporan	20.000.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		20.000.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>	3 Laporan	1.350.000	Kab. Banyumas, Kebasen,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.350.000	KECAMATAN KEBASEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa				
5	38534	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan</i>	1	26.900.000			-	26.900.000	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	<i>Persentase Penyelenggaraan Penugasan Kepala Daerah di Wilayah Kecamatan</i>	1	26.900.000			-	26.900.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>	60 Orang	1.900.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.900.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>	6 Dokumen	25.000.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		25.000.000	KECAMATAN KEBASEN
6	38899	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	<i>Persentase APBDes tepat waktu</i>	1	41.700.000			-	11.730.000	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<i>Persentase desa yang mendapatkan pendampingan</i>	1	41.700.000			-	11.730.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa								
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>	2 Dokumen	3.700.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.700.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa								
			<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>	12 Dokumen	5.750.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5.750.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
			<i>Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</i>	3 Dokumen	30.000.000	Kab. Banyumas, Kebasen, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.000	KECAMATAN KEBASEN
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa								
			<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa</i>	3 Dokumen	2.250.000	Kab. Banyumas, Kebasen,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2.250.000	KECAMATAN KEBASEN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
						Semua Kel/Desa				
J U M L A H					2.292.447.000				2.401.204.000	

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/perencanaan/renja/laporan>



CAMAT KEBASEN
WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP., M.A.P
 Pembina Tk. I
 NIP. 197802201996121001

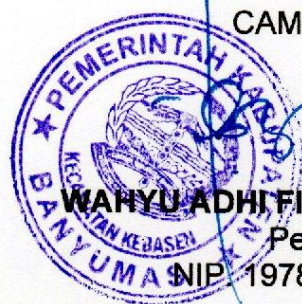
BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Kebasen Tahun 2025. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Kecamatan Kebasen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2025, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Kecamatan Kebasen Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas tahun 2024 - 2026 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2024 - 2026 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Kecamatan Kebasen dan seluruh *stakeholder* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Kecamatan Kebasen menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **"Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri"**.



CAMAT KEBASEN

WAHYU ADHI FIBRIANTO, S.STP., M.A.P
Pembina Tk. I
NIP. 197802201996121001